

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN SK GUBERNUR
DKI JAKARTA NOMOR 1409 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN
PELAKSANAAN REKLAMASI DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA JAKARTA
(Studi Putusan Nomor: 113/G/2019/PTUN-JKT)**

**Oleh:
ANNISA MUMTAKHANAH VIDI
E1A016184**

ABSTRAK

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor **113/G/2019/PTUN-JKT** yang akan mengkonstruksi sengketa yang timbul dari penerbitan SK Gubernur DKI Jakarta sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan dampak kerugian bagi PT. Jaladri Kartika Pakci sebagai pemegang izin reklamasi Pulau I dan menganalisis mengenai penerapan pembuktian yang diajukan para pihak serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan objek sengketa *a quo*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam sengketa *a-quo* bahwa sistem pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta telah sesuai berdasarkan asas pembuktian bebas dan KTUN yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada aspek prosedural, aspek substansi dan AUPB yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kesewenang-wenangan. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Gubernur DKI Jakarta dalam menerbitkan KTUN sepanjang berhubungan dengan pencabutan izin reklamasi Pulau I kepada PT. Jaladri Kartika Pakci tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka KTUN yang menjadi objek sengketa menjadi batal.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Pembatalan KTUN, Perizinan.

**JUDGES' RATIO DECIDENDI IN THE CANCELLATION OF DKI
JAKARTA GOVERNOR'S DECREE NUMBER 1409 YEAR 2018 ABOUT
THE REVOCATION OF GOVERNOR'S DECREE CONCERNING
GRANTING OF RECLAMATION IMPLEMENTATION PERMITS AT
THE JAKARTA STATE ADMINISTRATIVE COURT
(Study of Decision Number : 113/G/2019/PTUN-JKT)**

**By :
ANNISA MUMTAKHANAH VIDY
E1A016184**

ABSTRACT

This research is based on the verdict Number : **113 / G / 2019 / PTUN-JKT** of Jakarta Administrative Court in which will construct disputes that rises from the issuance of the DKI Jakarta Governor's Decree as a State Administration Officer that inflicts disadvantages for PT Jaladri Kartika Pakci as the holder of the Island I reclamation permit and analyzing the application of evidence submitted by the parties as well as the judge's legal considerations in sentencing the disputed object a quo. The approaching method used in this research is juridical normative method. The Data that being used is a secondary data which consisted of primary and secondary legal materials in the form of relevant laws and regulations dan also literatures. The conclusion that can be drawn from this research is, in the a-quo dispute, the verification system carried out by the Jakarta Administrative Court Judges is appropriate according to the principle of limited-free verification and the Administrative Decree which is the object of the dispute has contravened with laws and regulations, especially on procedural aspects, substance aspects, and The Principal of Good Governance, namely the Principle of Accuracy and the Principle of Arbitrariness. This is based on the fact that the Governor of DKI Jakarta in issuing State Administrative Decree in relation to the revocation of the Island I reclamation permit to PT. Jaladri Kartika Pakci is not in accordance with the procedures as regulated in the legislation. Based on this, the State Administrative Decree that is the object of the dispute becomes null.

Keywords: Judges' Legal Considerations, State Administrative Decree Cancellation, Licensing.

